ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2007

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Benni Ratriadi
3353404064

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Prof. Dra. Niswatin Rakub	Dra. Sucihatingsih DWP, M.Si
194101041964072001	195904211984032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si
196702071992031001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Prof.Dr.Rusdarti. M.Si
195904211984032001

Anggota I

Prof. Dra. Niswatin Rakub
194101041964072001

Anggota II

Dra. Sucihatingsih DWP, M.Si
195904211984032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Agus Wahyudin, M.Si
19620812198702100

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2009

Benni Ratriadi
3353404064

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Sebelum kedua telapak kaki seseorang menetap di hari kiamat, akan ditanyakan tentang empat hal lebih dulu : pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan, kedua tentang masa mudanya untuk apakah dipergunakan, ketiga tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apakah dibelanjakan, dan keempat tentang ilmunya, apa saja yang ia amalkan dengan ilmunya itu. (H.R. Bukhari-Muslim).
- Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain.(HR. Addaruquthni dan Ath Thabarani)
- Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah :5)
- "Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaran-Ku)" (QS. Yusuf : 19)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ♥ Ayah Ibu dan Kakakku
- ♥ Alm. Nenek
- ♥ Teman-teman di Prodi Ekonomi Pembangunan, khususnya EP '04 reguler
- ♥ Teman-teman di Imtihan kost
- ♥ Saudara-saudari, dan sahabat-sahabatku, yang senantiasa menemani perjuanganku selama ini…

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul: Analisis Disparitas Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007 dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat bantuan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
3. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Prof.Dr.Rusdarti,M.Si selaku penguji utama yang telah mengoreksi skripsi ini hingga mendekati kebenaran.
5. Prof. Dra Niswatin Rakub, Dosen Pembombing I yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Dra. Sucihatiningsih DWP, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan tidak lupa kritik dan saran perbaikan agar menjadikan skripsi ini lebih bermakna.

Semarang, Agustus 2009

Penulis

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

ABSTRAK

Ratriadi, Benni. 2009. *Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Prof. Dra. Niswatin Rakub, Pembimbing II. Dra. Sucihatiningsih DWP, M.Si.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, inflasi dan pengeluaran pemerintah

Pembangunan ekonomi yang baik dapat tercapai bila pertumbuhan ekonomi tinggi diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh disparitas pendapatan,inflasi dan pengeluaran pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut dikaji melalui penelitian ini. Permasalahan yang diungkap antara lain (1)Mendeskripsikan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007. (2) Menganalisis besarnya pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi,ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan pengeluaran pemerintah. Data berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dianalisis menggunakan indeks wiliamson dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007 menunjukkan Rata-rata Rata-rata ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007 yang dihitung dengan indeks ketimpangan Williamson sebesar 0,13. Ini berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkatan yang rendah.Berdasarkan analisis regresi variabel ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan secara bersama-sama dengan probabilitas sebesar 0,017. Secara parsial disparitas pendapatan dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas disparitas pendapatan sebesar 0,086 dan pengeluaran pemerintah sebesar 0,05. Sedangkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,006.

Dari hasil penelitian ini pemerintah kabupaten/ kota diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional tanpa harus memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan. Untuk itu dibuat kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru di luar Kota Jogja dan Sleman agar pemerataan aktivitas ekonomi, dan pada gilirannya pemerataan pendapatan dapat meningkat di masa depan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KELULUSAN..... iii
PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR BAGAN xii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR GRAFIK..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian..... 10
1.4 Kegunaan Penelitian..... 10

BAB II. LANDASAN TEORI
2.1 Pembangunan Ekonomi 12
2.2 Pertumbuhan Ekonomi 15
2.3 Produk Domestik Regional Bruto 18
2.4 Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi..... 19
2.5 Disparitas Pendapatan 20
2.6 Hipotesis U Terbalik Kuznet 23
2.7 Inflasi 25
2.8 Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah..... 27
2.9 Penelitian Terdahulu..... 28
2.10 Kerangka Berpikir 31
2.11 Hipotesis 32

BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian..... 33
3.2 Populasi Penelitian 33
3.3 Sumber Data..... 33
3.4 Variabel Penelitian 34
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... 36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 45
4.2 Uji Model..... 59

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

4.3 Pembahasan 66
BAB V. PENUTUP
5.1 Simpulan 71
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 75

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman
4.1 Rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di kabupaten/kota DIY tahun 2003-2007 50

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 PDRB Provinsi DIY atas dasar harga konstan th.2000 menurut lapangan usaha tahun 2003-2007 4
1.2 Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007 5
1.3 Perincian rata-rata PDRB perkapita,rata-rata PDRB dan persentase PDRB atas dasar harga konstan tahun 2003-2007..... 6
1.4 PDRB atas harga konstan 2000 DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2003-2007 7
1.5 Persentase PDRB atas harga konstan Th. 2000 DIY tahun 2003-2007 7
1.6 Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di DIY Tahun 2003-2007 52
4.1 PDRB perkapita atasa dasar harga konstan 2000 di Kabupaten/Kota DIY tahun 2006-2007 57
4.2 Ketimpanga distribusi pendapatan indeks williamson di kabupatan/kota se DIY tahun 2003-2007 58
4.3 Hasil Uji Multikolinieritas 59
4.4 Hasil Uji Autokorelasi 60
4.5 Koefisien Determinasi 62
4.6 Hasil Uji Bersama-sama..... 63
4.7 Hasil Uji t Statistik..... 64

PERPUSTAKAAN UNNES

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
2.1 Kerangka Berpikir 32
4.1 Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 47

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman
4.1 Laju inflasi di Kabupaten/Kota Di provinsi DIY tahun 2003-2007..... 49
4.2 Rata-rata laju peneluaran daerah kabupatendan kota di DIY tahun 2003-2007 51
4.3 Uji heteroskedenitas 61

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR LAMPIRAN

1. Produk Domestik Regional Bruto Riil 75
2. Produk Domestik Regional Bruto Nominal 75
3. Deflator PDRB..... 76
4. Laju Inflasi..... 76
5. Konsumsi Pengeluaran Daerah..... 77
6. Laju Konsumsi Pengeluaran Pemerintah 77
7. Laju Pertumbuhan di Kabupaten/Kota..... 77
8. Analisis Regresi 78
9. Indeks Williamson di Kabupaten/Kota 83

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antara daerah.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan masalah yang berbeda dari masalah pendapatan distribusi pendapatan. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna (*absolute equality*) maka tiap orang akan menerima pendapatan yang sama besar. Angka pendapatan per kapita yang ada selama ini merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk. Seberapa yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan.

Menurut Irma Adelman dan Chynthia Taft Morris (dalam Arsyad,1999:226), ada delapan hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dinegara sedang berkembang yakni:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga prosentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibanding dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengagguran bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri subsitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar (*term off trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain

Ketidakmerataan pembangunan antar daerah adalah indikator pemerataan daerah yang melibatkan sejauh mana pemerataan terjadi antar daerah dalam suatu wilayah tertentu sisi ketidakmerataan yang terjadi antar daerah. Pendapatan per kapita dan disparitas merupakan fungsi dari waktu. Pada tahap

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

awal pembangunan, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi regional yang cukup besar antara daerah telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan antar daerah. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi didaerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah akan cenderung menurun. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap daerah seiring dengan waktu yang berjalan (Etharina,2005:65). Kondisi tersebut dengan hipotesa Kuznet yang dikenal dengan hipotesa U terbalik (*Interved U Hypothesis Kuznet*), yang menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita mempunyai hubungan yang berbentuk U terbalik seiring waktu yang berjalan.

Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya

kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Tabel 1.1

PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003-2007 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	PERTANIAN	2.947.346	3.052.955	3.185.771	3.306.928	3.333.382
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	119.433	120.441	122.332	126.137	138.358
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	2.325.236	2400776	2463230	2481167	2.528.020
4	LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH INDUSTRI PENGOLAHAN	135.379	144.845	153.115	152.467	165.772
5	BANGUNAN	1.178.024	1.284.471	1.395.079	1.580.312	1.732.945
6	PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN	3.099.803	3.279.424	3.444.828	3.569.622	3.750.365
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.437.072	1.582.194	1.673.352	1.761.672	1.875.307
8	KEUANGAN PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	1.408.894	1.500.542	1.623.210	1.591.885	1.695.163
9	JASA-JASA	2.710.091	2.780.796	2.849.959	2.965.164	3.072.200
	TOTAL PDRB	15.361.278	16.146.444	16.910.876	17.535.354	18.291.512
	PERTUMBUHAN PDRB		5,1	4,7	3,7	4,31
	PENDUDUK (n)	3.189.444	3.298.033	3.343.651	3.388.733	3.434.534
	PDRB Per Kapita	4.816.287	4.895.778	5.057.608	5.174.605	5.325.762
	Pertumbuhan PDRB Per Kapita		1,65	3,31	2,31	2,92

Sumber: BPS, PDRB DIY

Berdasarkan tabel 1.1 pertumbuhan PDRB wilayah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat rendah. Pada tahun 2004 pertumbuhannya

mencapai 5,1% sedangkan tahun 2007 hanya mencapai 4,31%. Laju pertumbuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebesar 5,1% ini lebih rendah dari laju pertumbuhan nasional yang sebesar 6,3%. Sedangkan pendapatan perkapita di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2003 sampai 2007 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2003 sebesar 4.8162.871 dan tahun 5.325.762 pada tahun 2007.

Bila kita lihat dari tabel 1.2 ditiap kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 hanya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul mengalami petumbuhan yang tinggi. Kota Yogyakarta tumbuh sebesar 9,31 persen dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,88 persen. Sedangkan tiga kabupaten lainnya hanya tumbuh kisaran 4 persen. Dari kabupaten dan kota yang ada hanya kabupaten Gunungkidul yang pertumbuhannya terus meningkat bahkan melesat dari 3,36 persen pada tahun 2004 menjadi 7,88 persen tahun 2007.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Kota Yogyakarta	-	4,76	5,05	4,87	9,31
2	Kab. Sleman	-	5,08	5,25	5,03	4,42
3	Kab.Bantul	-	4,69	5,04	4,99	4,52
4	Kab. Gunung kidul	-	3,36	3,43	4,33	7,88
5	Kab. Kulonprogo	-	4,19	4,49	4,77	4,12

Tabel 1.3

Perincian Rata-Rata PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan,Rata-Rata PDRB Atas Harga Konstan Dan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2003-2007

Kabupaten dan Kota	Rata-rata PDRB atas dasar harga konstan th. 2003-2007	Rata-rata PDRB perkapita atas dasar harga konstan th. 2003-2007	Persentase PDRB atas dasar harga konstan th. 2003-2007
Kota Yogyakarta	4.387.917	877.583,4	26,13%
Kab. Gunung kidul	2.706.764	541.352,8	16,12%
Kab. Sleman	5.046.421,4	1.009.284,3	30,06%
Kab. Bantul	3.185.997	637.199,4	18,98%
Kab.Kulonprogo	1.463.079,6	292.615,9	8,71%

Sumber : BPS yang diolah

Namun bila kita lihat tabel 1.3 dari tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi perbedaan yang mencolok antara kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Sleman yang pendapatan perkapitanya sebesar Rp.1.009.284,3 sedangkan dikabupaten Kulonprogo hanya sebesar Rp. 292.615,9. Hal ini menunjukkan tingkat tingkat persebaran pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak merata. Pendapatan perkapita yang randah di Kulonprogo menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kulonprogo masih rendah.

PERPUSTAKAAN UNNES

Tabel 1.4

PDRB Atas Harga Konstan 2000 Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/kota Tahun 2003-2007 (Jutaan Rupiah)

Kabupaten dan Kota	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Yogyakarta	3.993.837	4.195.392	4.399.902	4.574.051	4.776.401
Kab. Gunung Kidul	2.526.516	2.613.238	2.726.389	2.726.289	2.941.288
Kab. Sleman	4.596.293	4.837.376	5.080.563	5.309.059	5.408.815
Kab. Bantul	2.932.376	3.080.312	3.234.173	3.234.173	3.448.949
Kab. Kulonprogo	1.338.700	1.398.743	1.465.477	1.524.848	1.587.630
Total	15.387.722	16.125.061	16.906.504	17.368.520	18.291.512

Sumber: BPS, PDRB DIY

Secara umum PDRB wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan. Dari tabel 1.4 PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirinci menurut kabupaten dan kota dapat diketahui adanya kabupaten dan kota yang begitu dominan yaitu Kabupaten Sleman. Sementara itu terdapat kabupaten dan kota yang paling rendah PDRBnya yaitu Kabupaten Kulonprogo. Dimana Sleman PDRBnya mencapai Rp 5.408.815 sedangkan Kulonprogo hanya Rp1.587.630.

Tabel 1.5

Presentase PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2006

Kabuapten dan kota	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Yogyakarta	26,00	25,98	26,02	26,08	26,11
Kab. Gunung Kidul	16,45	16,18	16,12	15,55	16,08
Kab. Sleman	29,92	29,96	30,04	30,28	30,57
Kab. Bantul	19,09	19,08	19,12	18,44	19,86
Kab. Kulonprogo	8,71	8,66	8,67	8,70	9,68

Sumber: BPS DIY (diolah)

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dicermati persentase PDRB yang diterima tiap kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tampak perbedaan yang mencolok. PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh Kabupaten

Sleman dimana Kabupaten Sleman rata-rata PDRBnya sebesar 30,05% dari total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan peringkat kedua diduduki oleh Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta ini memperoleh rata-rata persentase PDRB yan relatif besar yakni 26,05%. Sedangkan peringkat ketiga ditempati Kabupaten Bantul dengan 18,83%. Selanjutnya Kabupaten Gunung Kidul dengan 16,07% dan Kabupaten Kulonprogo sebesar 8,68%. Bila kita jumlahkan PDRB Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebesar 56,10 % persen atau setengahnya lebih dari total PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang memperoleh persentase PDRB tertinggi dengan kabupaten terendah ternyata terdapat perbedaan yang cukup besar dimana Kabupaten Sleman dengan 30,05% sedangkan Kabupaten Kulonprogo yang menempati peringkat terendah dengan 8,68%. Dengan gap yang cukup tinggi ini memuktikan adanya kesenjangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa haruslah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Isu kesenjangan perekonomian dan distribusi pendapatan antar daerah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan harmonisasi sosial. Dengan tingkat pendapatan tertentu, kenaikan kesejangan akan selalu berimplikasi pada kenaikan kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Data Badan Pusat Statistik Provinsi DIY Tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) per kapita dari 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY sangatlah bervariasi. Hal itu berarti masih terdapat kesenjangan pendapatan yang ditunjang oleh perbedaan potensi antar daerah yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada. Dengan perbedaan potensi daerah tersebut, kesenjangan antar daerah juga semakin besar, baik berupa kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, investasi, dan Pendapatan Asli Daerah. Gambaran kesenjangan seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY agar perencanaan pembangunan daerah dapat ditentukan prioritasnya, khususnya dalam era otonomi daerah saat dimana pemerintah kabupaten/kota diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan arah kebijaksanaan pembanguan agar tercapai laju pertumbuhan yang tinggi tetapi juga diikuti dengan semakin rendahnya kesenjangan pendapatan.

Adapun yang menjadi masalah adalah:

1. Seberapa besar kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Seberapa besar pengaruh dari kesenjangan pendapatan kabupaten/kota dan faktor-faktor lainnya seperti inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar kabupaten yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari kesenjangan pendapatan kabupaten/kota,inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang masalah- masalah pembangunan ekonomi yang ada di daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan akademika dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

PERPUSTAKAAN
UNNES

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan dalam rangka meningkatkan pemahamannya pada masalah-masalah pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2.Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka perencanaan kebijakan program pembangunan ekonomi selanjutnya.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembangunan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan ekonomi harus dianggap sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial,sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro,1998:19).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek pembangunan. Pembangunan dalam arti yang luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi politik,sosial,ekonomi,budaya,pertahanan keamanan dan lain-lain.Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan pendapatan riil perkapita (Irawan dan Suparmoko,1997:5). Sedangkan menurut Sen pembangunan yakni sebagai perluasan kebebasan subtansif,mengharuskan berbagai sumber utama nonkebebasan disingkirkan,yaitu kemiskinan dan tirani ,minimnya peluang ekonomi dan kemiskinan sosial sistematis,penelantaran sarana umum dan intoleransi atau campur tangan yang berlebihan. (Thee Kian Wie,2004:4)

Pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan oleh orang tersebut. Pengertian pembangunan dapat dijelaskan dengan menggunakan dua pandangan yang berbeda, yakni (Widodo 2006: 3-4):

a. Pembangunan lama/ Pembangunan Tradisional

Pembangunan dalam pandangan ini diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

b. Pembangunan Modern

Pada sudut pandang ini, pembangunan dilihat sebagai upaya pembangunan yang tidak lagi menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan PDB sebagai tujuan akhir, melainkan pengurangan (atau dalam bentuk ekstrimnya penghapusan) tingkat kemiskinan yang terjadi, penanggulangan ketimpangan pendapatan serta penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja produktif.

Definisi pembangunan ekonomi menurut Meier (Kuncoro 2003: 17) adalah suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah "garis kemiskinan absolut" tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Dalam membedakan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Suryana (2000: 4) menyatakan bahwa, pembangunan ekonomi

merupakan usaha peningkatan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk.

Pengertian pembangunan secara tradisional yang menggunakan pendapatan per kapita sebagai ukuran pembangunan memiliki banyak kelemahan karena kurang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya, tidak menjamin kesempatan kerja dan pemerataan (Suryana 2000: 4).

Penelitian ini menggunakan definisi pembangunan secara modern yakni, peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya mampu mendorong perbaikan-perbaikan kondisi pada bidang pembangunan yang lain. Sehingga kue pembangunan bisa dinikmati secara merata oleh penduduk di wilayah tersebut.

Dari dua definisi pembangunan di atas, baik dari pandangan tradisional maupun dari pandangan modern, proses pembangunan haruslah memiliki tiga nilai inti dan tiga tujuan pembangunan.

Tiga nilai inti pembangunan menurut Todaro (2003: 25-28) yakni:

(1) Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (*sustenance*). Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan.

(2) Harga diri (self *esteem*). Setiap orang dan masyarakat senatiasa mendambakan dan mencari bentuk rasa hormat harga diri. Aplikasi

bentuk harga diri dapat berupa kekuasaan, identitas, martabat, kehormatan atau pengakuan.

(3) Kebebasan (*freedom*). Kebebasan diartikan secara luas sebagai kebebasan atau emansipasi untuk tidak merasa terasing (teraleniasi) akibat dari sifat kebodohan, kemiskinan, struktur kelembagaan dan kepercayaan-kepercayaan dogmatis orang lain.

Tujuan pembangunan menurut Todaro (2003: 28) adalah :

(1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok.

(2) Pendapatan, meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.

(3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Petumbuhan ekonomi adalah proses kenaikkan output perkapita dalam jangka panjang.Jelas dapat dilihat dari definisi ini bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai tiga aspek penting. Pertumbuhan ekonomi merupakan : 1) suatu “proses ”,bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian,yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu

kewaktu.(2) pertumbuhan ekonmi berkaitan dengan kenaikakan“output perkapita”. Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah proses output total dan jumlah penduduk.(3)Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi perspektif waktu yang cukup lama mengalami kenaikkan output perkapita. Tentu saja bias terjadi bahwa pada suatu tahun output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik,maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi (Boediono,1999:1).

Pertumbuhan ekonomi tercapai bilamana terdapat peningkattan perbandingan antara input dan output yang lebih besar serta adanya perkembangan ekonomi.Perkembangan ekonomi berarti adanya peningkattan produktifitas dan pertambahan Gross domestic produk (Hasibuan,1987:14). Selain itu pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic produk tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999:13).

Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai kenaikkan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya.kemampuan ini tumbuh sesuai kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan,demikian yang dikemukakan oleh Simon Kuznet (M.L Jinghan,1996:72) Kuznet memberikan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional dan

komponennya meliputi penduduk,tenaga kerja dan sebagainya.dimana ciri-ciri tersebut saling terkait satu sama lain dalam hubungan sebab akibat,keenam ciri tersebut adalah :

a) Laju pertumbuhan penduduk,penduduk yang cepat dan produk perkapita yang tinggi
b) Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatkan laju produk perkapita
c) Laju perubahan srtuktural yang tinggi yang mencakup peraliuhan dari pertanian ke nonpertanian ,dari industri kejasa,perubahan dalam skala unit-unit produktif,dan peralian dari usaha perorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum serta status kerja buruh
d) Semakin tingginya tingkat urbanisasi
e) Ekspansi negara maju
f) Peningkata arus barang ,modal dan orang antar negara

Meier mendifinifikan perkembangan ekonomi sebagai proses kenaikkan pendapatan riil perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Barran membenarkan pertumbuhan atau perkembangan dalam jangka waktu tertentu. Keduanya mendukung dan mensyaratkan pembangunan ekonominya harus bias menaikkan pendapatan perkapita dalam jangka panjang (M.L Jhigan 1996:7).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi diwilayah tersebut,yaitu kenaikkan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi (Tarigan,2005:46)

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk domestik Bruto,baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi disuatu wilayah (BPS 2004:1-2).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tiap tahun,sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini menggunakan harga tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini tahun dasar 2000.PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat penyesuaian dan struktur ekonomi sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada empat pendekatan yang digunakan yaitu menurut pendekatan produksi,pendekatan pendapatan,pendekatan pengeluaran dan metode alokasi.Menghitung angka PDRB dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan produksi dimana PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).Unit-unit produksi tersebut dalam

penyajian ini dikelompokkan menjadi sembilan sektor (9) usaha. Kesembilan sektor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pertanian

b. Pertambangan dan penggalian

c. Industri pengolahan

d. Listrik,gas dan air industri pengolahan

e. Bangunan

f. Perdagangan,hotel dan restoran

g. Pengangkutan dan komunikasi

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

i. Jasa-jasa

Cara penyampai PDRB ada dua (2) yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. Dimana PDRB harga konstan dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau tiap sektor ekonomi dari tahun ketahun dan mengukur laju pertumbuhan konsumsi ,investasi dan perdagangan antar pulau atau antar provinsi.

PERPUSTAKAAN UNNES

2.4 Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi

Wibisono (2003:102) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional didekati dengan hipotesa konvergensi yang terbagi atas dua hal yaitu absolute convergence berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik dan conditional convergence yang berdasarkan pada teori pertumbuhan endogenous. Kedua hipotesa konvergensi diatas termasuk dalam analisa

dinamis. Absolute convergence diartikan sebagai konvergensi yang terjadi pada daerah dalam suatu negara yang walaupun terjadi perbedaan dalam teknologi,preferensi dan instuisi antar daerah,namun perbedaan itu relatif lebih kecil dibanding dengan perbedaan antar negara (besifat lebih homogenitas). Konvergensi absolut digunakan untuk studi antar daerah dalam satu negara. Hipotesis konvergensi absolut ini sulit diterima karena dalam kenyataan pertumbuhan ekonomi regional hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perkapita awal saja.

Konvergensi kondisional adalah konvergensi yang dilakukan dengan melihat perilaku dan karekteristik antar negara atau antar daerah dalam suatu negara. Perbedaan antar negara adalah terbukti dan eksis. Wibisono (2003:115) menyatakan deengan melakukan tes hipotesis konvegensi kondisional maka akan mendapatkan manfaat yang lebih besar yaitu dapat mengetahui faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka panjang dengan cara memasukkan variabel-variabel terpilih yang dianggap mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional kedalam persamaan. Konvergensi dikatakan kondisional apabila tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada provinsi yang memiliki level pendapatan yang lebih rendah.

2.5 Disparitas Pendapatan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat

berpendapatan rendah merupakan masalah besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Setiap daerah yang melaksanakan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih baik jika diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat (Widodo 2006: 95).

Adanya heterogenitas dan beragamnya karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Kesenjangan/ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri (Kuncoro 2004: 133).

Menurut Williamson yang meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih "matang", dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan (Kuncoro 2004: 134).

Penelitian yang dilakukan oleh Arbia *et al.* (dalam Miftah 2005:7) tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan disparitas antar wilayah di Uni Eropa dan negara-negara transisi Uni Eropa menunjukkan kecenderungan arah hubungan yang positif. Dalam penelitiannya membagi

dua kelompok wilayah, yaitu kelompok 162 wilayah dari 13 negara (Austria, Belgia, Jerman, Spanyol, Prancis, Yunani, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugis, Swedia dan Inggris Raya) dengan kurun waktu 1977-2002. Kelompok kedua adalah kelompok 203 wilayah dari 16 negara (termasuk negara yang tergabung dalam kelompok sebelumnya, ditambah Hungaria, Polandia, Ceko, dan wilayah Jerman Timur) dengan kurun waktu yang lebih pendek

Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten/kota akan memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kedua hal tersebut. Pembahasan ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota dalam penelitian ini menggunakan Indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan Indeks Ketimpangan Williamson

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Yi - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

PERPUSTAKAAN
UNNES

Keterangan:

IW = Indeks Ketimpangan Williamson

Yi = PDRB per kapita di Kabupaten/Kota j

Y = PDRB per kapita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota j

n = Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kuncoro 2004: 133)

Angka Indeks Ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar (Kuncoro 2004: 134).

2.6 Hiportesis U Terbalik Dari Kuznet

Dalam hasil penelitiannya tahun 1955, Simon Kuznetz mengamati perilaku umum yang berkaitan dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbedaan pendapatan. Pengamatan pada rangkaian data yang berurutan di Amerika Serikat., Jerman, dan Inggris. Kuznets menentukan bukti yang mengagumkan bawa hubungan itu berbentuk U terbalik yaitu proses pertumbuhan melalui perluasan sektor modern yang pada awalnya mengakibatkan peningkatan perbedaan pendapatan diantara rumah tangga kemudian mencapai tingkat pendapatan rata-rata tertentu dan akhirnya mulai menurun. Kuznets menyebutkan bahwa di antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi terdapat 2 faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern.

Dalam penjelasan mengenai faktor pertamanya, Kuznets mengatakan bahwa kelompok pendapatan tinggi memberikan kontribusi modal tabungan yang besar sementara modal dari kelompok lainnya sangat kecil. Dengan

kondisi-kondisi lain yang sama perbedaan dalam kemampuan menabung akan mempengaruhi konsentrasi peningkatan proporsi pemasukan dalam kelompok pendapatan tinggi. Proses ini akan menimbulkan dampak kumulatif yang lebih jauh akan meningkatkan kesejahteraan kelompok pendapatan tinggi kemudian akan memperbesar kesenjangan pendapatan dalam suatu negara.

Penjelasan kedua timbul akiat pergeseran penduduk dari sektor pedesaan (A) menuju sektor perkotaan (B). Kesenjangan pendapatan meningkat karena produktivitas sektor pertanian. Beberapa penyebab kesenjangan ekonomi dijelaskan oleh Kuznets sebagai berikut:

a. Jika perbedaan pendapatan per kapita meningkat atau jika perbedaan distribusi pendapatan pada sektor B lebih tinggi dibandingkan dengan sektor A atau jika kedua perbedaan itu timbul bersamaan
b. Jika distribusi pendapatan intersektor sama untuk kedua sektor peningkatan kesenjangan distribusi pendapatan diseluruh negara lainnya berlaku pada peningkatan pendapatan per kapita disektor tersebut
c. Jika perbedaan pendapatan perkapita antar kedua sektor konstan tetapi distribusi intersektor B lebih besar dibandingkan dengan sektor A
d. Peningkatan proporsi jumlah total sektor B dari perbedaan distribusi yang besar dalam sektor B, semakin tingginya tingkat pendapatan per kapita pada sektor B yang melebihi tingkat pendapatan sektor A
e. Walaupun perbedaan pendapatan perkapita antar kedua sektor tetap konstan dan sektor distribusi intersektor sama diantara kedua sektor

pergeseran jumlah proporsi jumlah proposi yang kecil akan menghasilkan perubahan distribusi pendapatan yang berarti

f. Adanya penurunan persentase bagian dari kelompok penghasilan tinggi terhadap pendapatan nasional yang ditunjukkan dengan jatuhnya proporsi sektor A dibawah garis total pendapatan

2.7 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga. Inflasi menjadi salah satu fenomena moneter yang menjadi perhatian utama para ekonom dan pembuat kebijakan (Mankiw, 2000:194). Sedangkan Puspita (2005:25) menyatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator PDRB. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mempunyai dampak yang luas terhadap makro ekonomi, termasuk pertumbuhan. Boediono (1982:156) menggolongkan inflasi berdasarkan lajunya per tahun menjadi empat bagian yaitu (1) inflasi ringan (dibawah 10%), (2) inflasi sedang (10%-30% setahun), (3) inflasi berat (30%-100% setahun), dan hiperinflasi (lebih 100% setahun).

Laju inflasi menunjukkan stabilitas harga yang merupakan ukuran keberhasilan ekonomi makro suatu negara. Inflasi yang tinggi biasanya ditengarai memiliki *efek negatif* bagi perekonomian sebab inflasi yang tinggi akan mengganggu mobilisasi dana domestik dan tingkat investasi. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk jika terjadi inflasi

yang tinggi yang tidak dikendalikan, sebab akan mengurangi investasi produktif, mengurangi eksport dan menaikkan impor barang sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi (hiperinflasi) dan tidak dapat diprediksikan. Sukirno (1994:11) menggolongkan inflasi atas dasar sebab terjadinya menjadi dua macam, yaitu inflasi tarikan permintaan *(demand pull inflation)* dan inflasi desakan biaya *(cost push inflation). Demand pull inflation* yaitu inflasi yang timbul karena adanya permintaan masyarakat *(demand side)* akan berbagai barang terlalu kuat dimana permintaan masyarakat ini tidak bisa diimbangi dengan tersedianya barang yang disediakan oleh perekonomian, sehingga akan mengakibatkan perpindahan kurva permintaan agregat *(agregat demand=AD) naik* dan mendorong kenaikan harga-harga. Perusahaan-perusahaan akan beroperasi pada kapasitas yang maksimal sehingga berdampak *positif* dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya *cost push inflation* adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan biaya produksi *(suplai side)*. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menaikkan harga atas barang yang diproduksi walaupun mereka menghadapi ancaman resiko pengurangan permintaan atas barang-barang yang diproduksi tersebut. Tindakan ini akan mengakibatkan perpindahan kurva penawaran agregat *(agregat suplai=AS)* ke atas sehingga mengakibatkan harga-harga naik tetapi outputnya justru menurun dan berdampak *negatif*.

Inflasi diterangai memiliki efek negatif bagi perekonomian. Setyowati, dkk (2000:114) menyatakan dampak inflasi antara lain (1) inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif yang tidak berdampak terhadap pendapatan nasional, (2) inflasi menyebabkan tingkat bunga yang meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi, (3) inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang, (4) inflasi menimbulkan masalah dalam neraca perdagangan, (5) inflasi memperburuk distribusi pendapatan, (6) inflasi menyebabkan pendapatan riil merosot. Secara umum rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi dan tidak dapat diprediksikan (hiperinflasi). Studi empirik menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Wibisono,2005:98).

2.8 Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah (Government Purchase)

Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan. Variabel ini digunakan untuk mengukur pengeluaran pemerintah yang tidak memperbaiki produktivitas perekonomian. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang tidak produktif, semakin kecil tingkat pertumbuhan perekonomian daerah. Menurut Anaman (dalam Sinung Noegroho,2007:25) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatakan pertumbuhan ekonomi dan

PERPUSTAKAAN UNNES

pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah relatif penting berperan dalam sektor perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien tidak akan memperbaiki produktivitas perekonomian daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang tidak produktif, maka semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan berkurang (Wibisono,2003:99). Sukirno (1994:115) menyatakan bahwa dalam setiap perekonomian terdapat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran yang akan secara otomatik menciptakan kestabilan pada perekonomian yang disebut kebijakan fiskal penstabilan otomatik *(automatic stabilizer).* Tanpa adanya *automatic stabilizer* perubahan akan menjadi lebih besar atau bahkan menjadi lebih kecil. Dengan adanya penstabil otomatik maka gerak naik turun perekonomian diperkecil sehingga mengurangi konjungtur perekonomian yang terjadi dari waktu ke waktu. *Automatic stabilizer* terkait nilai pertambahan output akibat adanya pengeluaran pemerintah sehingga besarnya menjadi lebih kecil dari pertambahan output yang diharapkan.

2.9 PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Farid (2007)“ Pengaruh Disparitas Antar Daerah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Menggunakan Data Panel Propinsi. Hasil dalam penelitian ini pertumbuhan

ekonomi Indonesia secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 hingga 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,78 % - 5,60 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2005 hanya 3,20%. Tetapi berdasarkan pertumbuhan ekonomi tiap daerah di Indonesia, menunjukkan adanya disparitas. Disparitas terjadi antara rata-rata pertumbuhan ekonomi P. Sulawesi dan P. Jawa dengan pulau-pulau yang lain, yaitu P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Bali dan Nusa Tenggara serta P. Maluku, Maluku Utara dan Papua. Faktor penyebab disparitas antar daerah salah satunya adalah kurang lancarnya perdagangan antar pulau yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, sehingga hal ini akan menyebabkan disparitas kinerja ekspor di setiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pengaruh disparitas antar daerah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Motode estimasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pertama, hubungan antara disparitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan, pada level signifikansi 95%. Hubungan positif yang dihasilkan dalam hasil estimasi merupakan gambaran dari dampak jangka pendek dari disparitas terhadap pertumbuhan ekonomi, karena data yang digunakan hanya mencakup 3 (tiga) tahun. Pada jangka pendek, disparitas berguna untuk mengintegrasikan faktor-faktor produksi sehingga mencapai efisiensi tinggi dan akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kedua, Hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. Dari hasil estimasi

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% nilai ekspor akan meningkatkan PDRB sebesar 0,067%. Pengaruh positif dari ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa *spill over effect,* diantaranya adalah peningkatan produktifitas dan penguasaan karakteristik pasar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amparo Castello-Climent (2005) "A Reassessment Of Relationship Between Inequality And Growth : What Human Capital Inequlity Data Say" . Hasil studi ini menemukan hasil bahwa ketidakmerataan sangat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan dan jangka pendek pada sebuah negara.hubungannya negatif terutama untuk sebuah efek pengurangan ketidakmerataan terhadap tingkat investasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Araceli Ortega-Diaz (2003) "Assessment of the relationship between income inequlity and economic growth :a panel data analysis across the 32 federal entties of mexico 1960-2002". Hasil penelitiannnya menceritakan tentang hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tergantung dari beberapa faktor seperti pasar modal yang tidak sempurna,moral hazard,pembagian investasi dan karakrteristik eksistensi ekonomian ganda. Karekter terakhir tentang pentingnya geografi diutamakan dalam menentukan hubungan ini untuk penyesuain pasar terbuka .menaksir bagaimana ketidakmerataan pertumbuhan pendapatan mempengaruhi bentuk persamaan. Dengan menggunakan analisis data panel dinamis untuk 32 negara bagian Meksiko. Data pendapatan penduduk kota dan pendapatan rumah tangga dari survey

nasional ditemukan bahwa ketidakmerataan dan pertumbuhan mempunyai hubungan positif. Dalam analisis dengan waktu yang berbeda terdapat dua perbedaan yang muncul :1) kebijakkan pasar tertutup dalam ketidakmerataan pertumbuhan memiliki pengaruh negatif dan pengaruh positif pada pasar terbuka jika pendapatan personal kota dipertimbangkan. 2) hubungan terbalik jika pendapatan rumah tangga digunakan. Untuk melengkapi penelitian ini juga memperhitungkan bentuk struktur persamaan kedalam efek akun fiskal dari ketidakmerataan pertumbuhan. Dimana hasilnya berpengaruh positif.

2.10 KERANGKA BERFIKIR

Perencanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Pembangunan ekonomi (Arsyad 1997: 10) dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih baik jika diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil-hasil pembangunan.

Sementara itu dari berbagai studi empiris menyatakan kesenjangan pendapatan yang dihitung dengan indeks williamson berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain kesenjangan pendapatan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh inflasi dan pengeluaran pemerintah. Keterkaitan

ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada bagan berikut :

Kerangka Berpikir

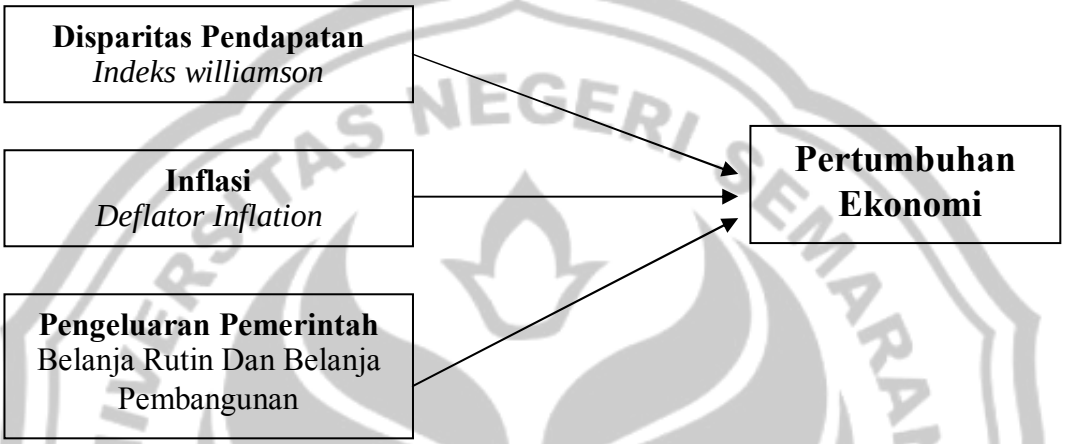

2.11 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsini 1998:67). Dari uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh disparitas pendapatan inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari pendekatannya penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto 2006: 12).

3.2 Populasi penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1998: 103) populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel karena merupakan penelitian populasi dimana semua populasi digunakan sebagai sampel.

3.3 Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak- pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakannya. Sumber data tersebut

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

didapat dari Biro Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bappeda DIY. Sedangkan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berdasarkan urutan waktu (time series data) untuk kurun waktu 2003-2007. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas harga konstan tahun 2000 daerah kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat inflasi DIY,dan total belanja rutin dan belanja pembangunan dari pemerintah daerah

3.4 Variabel penelitian

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998:33). Variabel dalam penelitian ini meliputi:

3.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan *proxy* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. Untuk menghitung variabel pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Rog = (PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1} \times 100\%$$

Dimana:

rog = Pertumbuhan ekonomi daerah

$PDRB_t$ = PDRB pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB pada satu tahun sebelum t.

(Kuncoro 2004: 114)

Dalam penelitian ini besarnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan dimensi persentase (%).

PERPUSTAKAAN UNNES

3.4.2 Disparitas Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Dalam penelitian ini variabel ketimpangan distribusi pendapatan dianalisis dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Yi - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

IW = Indeks Ketimpangan Williamson

Yi = PDRB per kapita di Kabupaten/Kota j

Y = PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah

fi = Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota j

n = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

(Kuncoro 2004: 133)

PDRB per kapita = PDRB/ jumlah penduduk

(Kuncoro 2004: 114)

Dalam penelitian ini besarnya ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menggunakan dimensi rasio (desimal).

3.4.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga. Inflasi diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator PDRB

PDRB deflator = (PDRB nominal/PDRB riil)x100

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

$$LI_t = \frac{PDRBDt - PDRBDt - 1}{PDRBDt - 1}$$

Dimana :

LI_t = laju inflasi tahun periode t

$PDRBD_t$ = indeks PDRB deflator periode t

$PDRB_{t-1}$ = indeks deflator periode t-1

3.4.4 Konsumsi pengeluaran pemerintah daerah (government purchase)

Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan dari pemerintah daerah

3.5 Teknik pengolahan dan analisis data

Sesuai tujuan peneltian yang telah dijelaskan diatas maka alat analisis yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah

3.5.1 Tingkat disparitas antar daerah

Metode untuk mengukur ketidakmerataan regional dapat digunakan indeks Williamson, yang diperkenalkan oleh Williamson dalam papernya tahun 1965. metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk masing- masing daerah

$$\mathbf{Iw} = \frac{\sqrt{\sum (Yi - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

Iw : Indeks Williamson

Yi : Pendapatan perkapita dimasing-masing Kabupaten dan kota

Y : Pendapatan perkapita diwilayah DIY

F : Jumlah penduduk di masing- masing Kabupaten atau kota

N : Jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

HT Oshima (dalam Sutawijaya,2004:46) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan dalam masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang, atau tinggi.

Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut:

a. Ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson < 0,35
b. Ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson < 0,35-0,50
c. Ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson >50

3.5.2 Regresi linier berganda

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah disparitas pendapatan, inflasi regioanal, dan konsumsi pengeluaran pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kata lain untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i$$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan ekonomi

α : Bilangan konstanta

X_1 : Disparitas Pendapatan

X_2 : Inflasi Regional

X_3 : Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien masing-masing variabel

μ_1 :Residu

Untuk mengetahui apakah parameter-parameter koefisien regresi memenuhi uji asumsi klasik; serangkaian uji/ tes yang diperlukan, yaitu:

3.5.2.1 Uji Signifikansi Bersama-sama(Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$H0 : b_1 = b_2 = ... = bk = 0$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Hα)

$H\alpha : b_1 \neq b_2 \neq ..... = bk \neq 0$

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Artinya, semua variabel independen secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali 2001: 44-45).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputansi SPSS *for Windows release 15.* Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. *Quick look*: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 yang menyatakan $b_1=b_2=\ldots=bk=0$ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha. (Ghozali 2001: 45) Dalam penelitian ini uji hipotesis statistik F menggunakan kriteria pengambilan keputusan *Quick Look*.

3.5.2.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat/dependen. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b1) sama dengan nol, atau:

$H0 : b_1 = 0$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Hα) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$H\alpha : b_1 \neq 0$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali 2001: 44)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputansi *SPSS for* Windows *release 15*. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. *Quick look*: bila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang menyatakan bi=0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dan menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independent secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan *nilai* statistik t dengan nilai kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.(Ghozali 2001: 44)

Dalam penelitian ini uji hipotesis statistik t menggunakan kriteria pengambilan keputusan *Quick Look*.

3.5.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara antara masing-masing pengamatan; sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti nilai R^2 nilai a*djusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali 2001: 45-46).

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

3.5.2.4 Uji Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linear terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

3.5.2.5 Uji *Multikolinieritas*

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan hubungan linier di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil tidak bisa digunakan (Sumodiningrat 2002: 281). Uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF= 1/ *tolerance*) dan menunjukkan kolinieritas yang tinggi. Lebih ditegaskan oleh Ghozali (2001: 59) bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 90% maka VIF-nya di atas 10 maka dapat dikatakan bahwa model tersebut multikolinieritas.

3.5.2.6 Uji *Autokorelasi*

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau *time series data*) atau yang stersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional* data)(Sumodiningrat 2001: 231).

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan penghitungan nilai Durbin Watson(DW) hasil output SPSS dengan tabel Durbin Watson (*Durbin Watson Test Bound*). Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila nilainya 1,65< DW<2,35, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilainya 1,21<DW<1,65,atau 2,35<DW<2,79,berarti kesimpulannya tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*).
3. Bila nilai DW<1,21 atau DW >2,79,berarti ada autokorelasi.

3.5.2.7 Uji *Heteroskedastisitas*

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran

(kecil, sedang, besar). Sedangkan dasar dari pengambilan keputusan dengan melihat grafik scatterplot pada tabel SPSS dengan program komputasi *SPSS for Windows release 15*, dengan dasar analisis: Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali 2001: 69)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi :

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- Pegunungan Selatan, luas + 1.656,25 km² ,ketinggian : 150 – 700 m
- Gunung berapi Merapi, luas : + 582,81 km2 ,ketinggian : 80 – 2.911 m
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo,luas : + 215,62 km² ketinggian : 0 – 80 m
- Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan,luas : + 706,25 km² ketinggian : 0 – 572 m.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

Posisi D.I. Yogyakarta yang terletak antara 7°.33′ - 8°.12′ Lintang Selatan dan 110°.00′ - 110°.50′ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km^2), merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari :

- Kabupaten Kulonprogo,dengan luas 586,27 km² (18,40 persen)
- Kabupaten Bantul,dengan luas 506,85 km² (15,91 persen
- Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen)
- Kabupaten Sleman,dengan luas 574,82 km² (18,04 persen)
- Kota Yogyakarta,dengan luas 32,50 km² (1,02 persen)

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas D.I. Yogyakarta, 3 3,05 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 persen Regosol, 12,38 persen Lathosol, 10,97 persen Grumusol, 10,84 persen Mediteran, 3,19 persen Alluvial, dan 2,47 persen adalah tanah jenis Rensina.

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m – 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 65,65 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 28,84 persen, ketinggian antara 500 m – 999 m sebesar 5,04 persen dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 persen.

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 0,00 mm – 709,00 mm per-hari yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto, suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2007 menunjukkan angka 27,35^o C lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2006 yang tercatat sebesar 26,6^o C, dengan suhu minimum 19,0 o C dan suhu maksimum 36,2^o C. Curah hujan

berkisar antara 0 mm – 1050,0 mm dengan hari hujan per bulan antara 0,0 kali – 27,0 kali. Sedangkan kelembaban udara tercatat antara 69 persen – 96 persen, tekanan udara antara 1.003,4 mb - 1.015,4 mb, dengan arah angin antara 60 derajat - 240 derajat dan kecepatan angin antara 1 knot sampai dengan 25 knot.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

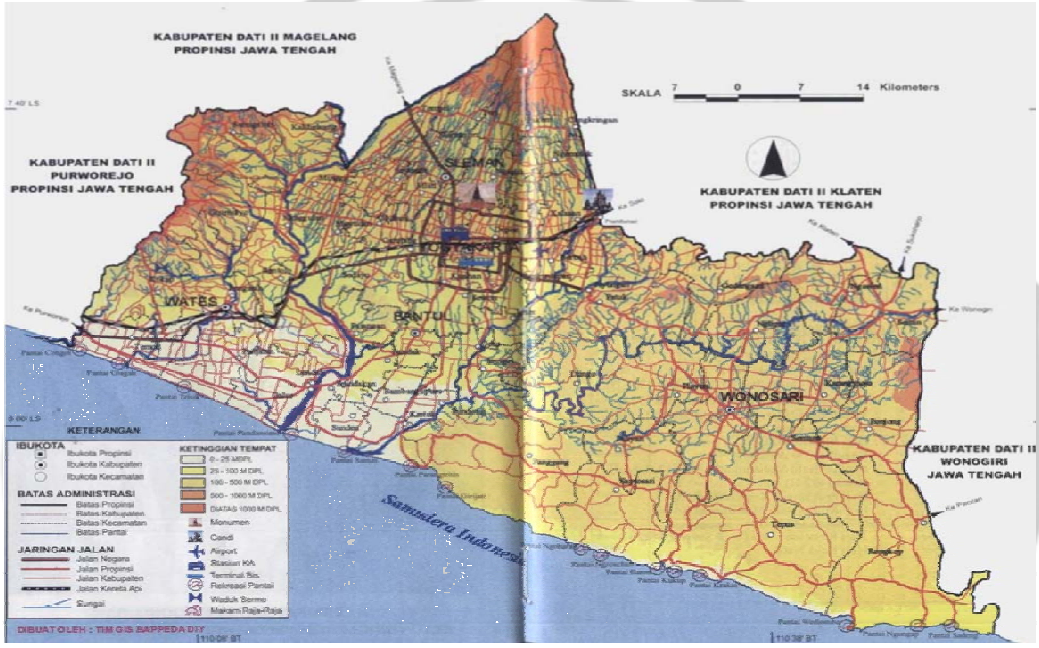

Sumber : BPS DIY

4.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mempunyai dampak yang luas terhadap makro ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2000:194) menyatakan bahwa inflasi merupakan kenaikan dalam keseluruhan tingkat harga, sedangkan Dornbusch et.al (2004:34) menyatakan bahwa inflasi adalah persentase kenaikan harga tingkat umum.

Laju inflasi menunjukkan stabilitas harga yang merupakan ukuran keberhasilan ekonomi makro suatu negara. Inflasi yang tinggi biasanya ditengarai memiliki *efek negatif* bagi perekonomian sebab inflasi yang tinggi akan mengganggu mobilisasi dana domestik dan tingkat investasi. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk jika terjadi inflasi yang tinggi yang tidak dikendalikan, sebab akan mengurangi investasi produktif, mengurangi eksport dan menaikkan impor barang sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi (hiperinflasi) dan tidak dapat diprediksikan.

Menurut Sukirno (1994:11) mengatakan bahwa inflasi yang sangat lambat dipandang sebagai *stimulator* dan berdampak *positif* terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan harga-harga yang tidak segera diikuti oleh kenaikan upah pekerja sehingga keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa mendatang dan ini akan mewujudkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan GNP deflator terlihat di grafik 4.1 laju inflasi kabupaten dan kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif sama. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yang terjadi di Kabupaten Bantul,kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta yang menembus angka 2 digit yaitu 14 %. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005, sehingga harga rata-rata barang dan jasa pada tahun 2006 melonjak sangat

tajam. Dimana laju inflasi ini dimasukkan pada kategori sedang. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2007 dikota Yogyakarta hanya 2%.

Grafik 4.1
Laju inflasi di kabupaten dan kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007

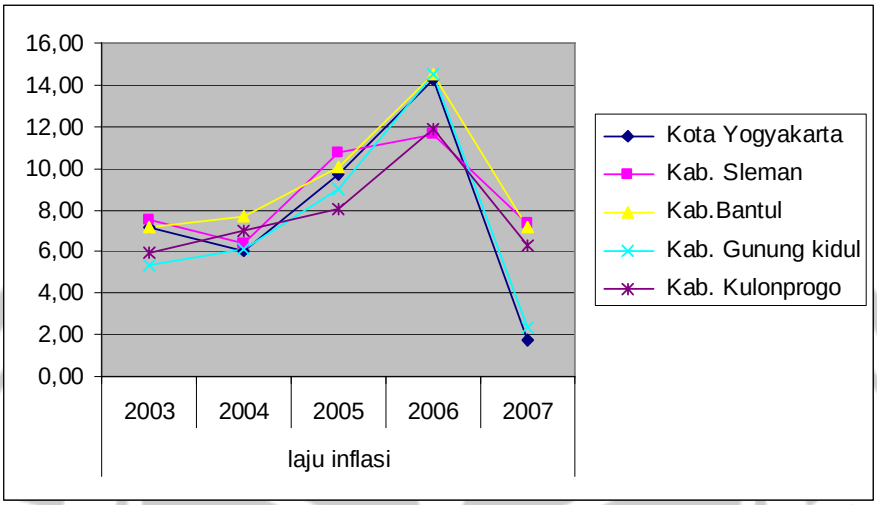

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah)

4.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah relatif penting berperan dalam sektor perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien tidak akan memperbaiki produktivitas perekonomian daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang tidak produktif, maka semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan berkurang (Wibisono,2003:99). Dalam setiap perekonomian terdapat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran yang akan secara otomatik menciptakan kestabilan pada perekonomian yang disebut kebijakan fiskal penstabilan otomatik *(automatic stabilizer).* Tanpa adanya *automatic stabilizer* perubahan akan menjadi lebih besar atau bahkan menjadi

PERPUSTAKAAN UNNES

lebih kecil. Dengan adanya penstabil otomatik maka gerak naik turun perekonomian diperkecil sehingga mengurangi konjungtur perekonomian yang terjadi dari waktu ke waktu.

Bagan 4.1
Rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007

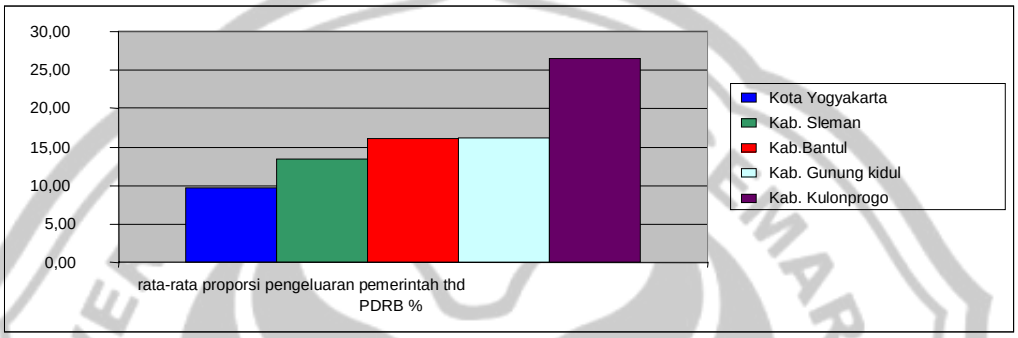

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah)

Dari bagan 4.1 memperlihatkan rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/ kota periode 2003-2007. Apabila dilihat proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB-nya selama kurun waktu tahun 2003–2007 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran pemerintah daerah mempunyai rata-rata sebesar 10 persen (Kota Yogyakarta) sampai 26 persen (Kabupaten Kolonprogo) serta rata-rata keseluruhan sebesar 16,3 persen. Anaman (2004:89) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil proporsinya akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang terlalu boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif oleh pengeluaran pemerintah dihasilkan oleh daerah-daerah yang memiliki proporsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP-nya di atas

12 persen, sedang dampak positif dihasilkan oleh daerah-daerah yang memiliki proporsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP-nya di bawah 12 persen.

Grafik 4.2

Laju pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007

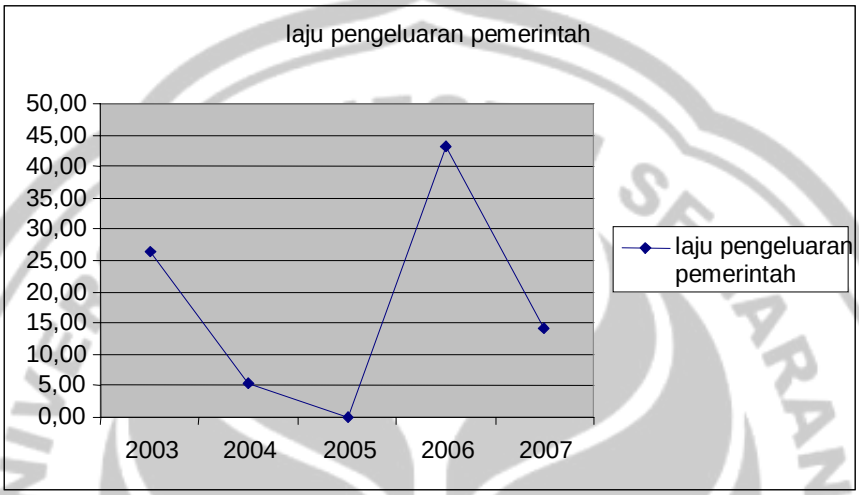

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah)

Grafik 4.2 menunjukkan rata-rata laju pengeluaran pemerintah daerah dari kabupaten/ kota periode 2003-2007. Terlihat bahwa laju pengeluaran konsumsi pemerintah terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 0,04 persen sedangkan laju pengeluaran pemerintah daerah tertinggi dicapai tahun 2006 ketika terjadi bencana gempa bumi sebesar 40,1 persen.laju pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2005 sangat rendah disebabkan penurunan belanja pelayanan publik yang disebabkan berkurangnya dana perimbangan.

4.1.4 Ketimpangan pendapatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang juga diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan atas dasar harga konstan. Menurut Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000, mengalami sedikit sedikit kenaiikan dibandingkan dengan tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebesar 3,7% sedangkan tahun 2007 sebesar 4,31%. Kenaikkan tersebut cukup menggembirakan karena ini membuktikan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta cepat pulih setelah terjadi gempa pada tahun 2006 yang membuat pertumbuhan pada saat itu rendah sekali.

Berikut ini disajikan tabel perkembangan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam juta rupiah) dari tahun 2003 – 2007.

Tabel 4.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 – 2007, (juta rupiah)

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB
2003	15361278	
2004	16146444	5.1
2005	16910876	4.7
2006	17535354	3.7
2007	18291512	4.31

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2003-2007)

PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Besarnya PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kontribusi dari wilayah-wilayah kecil yang ada di dalamnya, yakni 4 Kabupaten dan 1 Kota. Kondisi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto antar Kabupaten/Kota pada akhirnya akan memberi warna pada perkembangan PDRB di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007 mengalami kenaikkan. Tahun 2006 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 % menjadi 6,05% di tahun 2007. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tahun 2006-2007 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,43%. Angka laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong masih rendah. Berikut disajikan tabel laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2007.

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2006 – 2007

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan	
		2006	2007
1	Kota Yogyakarta	4,87	9,31
2	Kab. Sleman	5,03	4,42
3	Kab.Bantul	4,99	4,52
4	Kab. Gunung kidul	4,33	7,88
5	Kab. Kulonprogo	4,77	4,12

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2007 (data diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan angka pertumbuhan sebesar 5,03%. Angka pertumbuhan tertinggi di tahun 2007 dicapai oleh Kota Yogyakarta, yakni sebesar 9,31%. Kabupaten Gunungkidul dengan angka pertumbuhan 4,33% pada tahun 2006 merupakan Kabupaten/Kota dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Kulonprogo yakni sebesar 4,12%.

Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan penghasil PDRB terbesar seperti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2006 ternyata mampunyai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman adalah 5,03%, dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yakni sebesar 4,87%. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan Kota Yogyakarta naik menjadi 9,31% dan Kabupaten Sleman turun menjadi 4,42%.

Laju pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 - 2007 yang sedikit mengalami kenaiikan. Ternyata hanya diikuti oleh 2 Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten/Kota tersebut antara lain Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung kidul. Angka Kenaiikan pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 4,44% dicapai oleh Kota Yogyakarta. Penurunan pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Sleman, yakni sebesar -0.61%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota yang

senantiasa mengalami fluktuasi, menggambarkan kondisi naik turunnya perkembangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini, dapat disimpulkan Kabupaten/Kota tersebut mendorong pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Bila kondisi ini dapat dipertahankan secara konsisten. Dalam jangka panjang, nantinya dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin meningkat.

Besarnya PDRB per kapita menggambarkan kondisi yang lebih nyata mengenai kondisi perekonomian di suatu wilayah. Sebab dalam penghitungannya telah melibatkan jumlah penduduk. Sehingga dapat diketahui tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk di wilayah tersebut. Rata-rata PDRB per kapita Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 sebesar Rp.5.155.711,00 dan tahun 2006 sebesar Rp. 5.325.762,00. PDRB per kapita yang dihasilkan oleh Kota Yogyakarta di tahun 2006 yakni sebesar Rp.10.322.562,00. PDRB per kapita Kota Yogyakarata merupakan PDRB per kapita terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diikuti oleh Kabupaten Sleman dengan PDRB per kapita sebesar Rp.5.265.383,00. Hal ini sangat wajar karena terjadi aglomerasi ekonomi di kedua daerah ini. Sehingga menjamurnya rumah makan, rumah kos, perumahan, berbagai aktivitas perdagangan dan jasa, berjalan seiring dengan dibangunnya universitas, hotel, dan mal di dua daerah ini. Daerah penghasil PDRB per kapita pada posisi ketiga yakni Kabupaten Gunungkidul

sebesar Rp.4.141.979,00. Sedangkan Kabupaten Bantul memiliki PDRB per kapita yang paling rendah.

Pada tahun 2007 rata-rata PDRB per kapita di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan menjadi Rp.163.610,00. Kota Yogyakarta yang merupakan ibukota provinsi,pusat pemerintahan dan pusat perekonomian kembali menjadi penghasil PDRB per kapita terbesar di antara Kabupaten/Kota lain se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendapatan sebesar Rp.1.058.7919,00. Diikuti Kabupaten Sleman, kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo dengan besarnya PDRB per kapita masing-masing daerah tersebut adalah Rp.10.587.919,00; Rp.5.408.815,00 dan Rp.4.292.535,00. Kabupaten Bantul dengan PDRB per kapita sebesar Rp.3.845.008,00 merupakan daerah penghasil PDRB per kapita terendah di antara Kabupaten/ Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rata-rata PDRB per kapita selama tahun 2006-2007 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar Rp.163.610,00. Hal iui menggambarkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dilihat dari kondisi perekonomiannya semakin membaik.

Berikut disajikan tabel PDRB per kapita Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2007.

Tabel 4.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 – 2007

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita		Perubahan PDRB perkapita
		2006	2007	
1	Kota Yogyakarta	10322562	10587919	265357
2	Kab. Sleman	5265383	5408815	143432
3	Kab.Bantul	3750344	3845008	94664
4	Kab. Gunung kidul	4141979	4292535	150556
5	Kab. Kulonprogo	4075913	4239955	164042

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah)

PDRB per kapita di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2006-2007 yang mengalami meningkat bisa jadi merupakan indikasi dari kondisi perekonomian yang mulai membaik. Namun, pada kenyataannya pembangunan ekonomi tersebut belum bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terbukti dari kesenjangan yang nampak pada PDRB per kapita yang dihasilkan oleh daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai daerah penghasil PDRB per kapita terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya. Besarnya kesenjangan tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan atau dapat disebut juga dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

Besarnya kondisi ketimpangan distribusi pendapatan tersebut dapat dihitung dengan Indeks Ketimpangan Williamson. Berdasarkan penghitungan Indeks Ketimpangan Williamson dapat diketahui bahwa kondisi ketimpangan di Kabupatem/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tidak jauh berbeda.

Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota sedaerah Yogyakarta dari tahun 2003-2007 berkisar 0,007-0,390. Bila dirata-rata Indeks Ketimpangan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007 sebesar 0,1355. Besarnya indeks ketimpangan tersebut kurang dari 0,35 sehingga dikatakan taraf ketimpangannya rendah. Namun bila kita lihat perkabupaten/kota hanya kota yogyakarta yang taraf ketimpangannya sedang karena indeks williamsonnya berada di 0,35-0,50 yaitu sebesar 0,366.

Berikut disajikan tabel Ketimpangan Distribusi Pendapatan Indeks Williamson di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007.

Tabel 4.4

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Indeks Williamson di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Williamson					Tingkat Ketimpangan
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Kota Yogyakarta	0,3904	0,3617	0,3604	0,3622	0,3581	Sedang
2	Kab. Sleman	0,0070	0,0090	0,0079	0,0114	0,0085	Rendah
3	Kab.Bantul	0,1243	0,1298	0,1316	0,1390	0,1421	Rendah
4	Kab. Gunung kidul	0,1032	0,0973	0,0944	0,0884	0,0867	Rendah
5	Kab. Kulonprogo	0,0849	0,0789	0,0752	0,0697	0,0673	Rendah

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah)

4.2 Uji Model

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

4.2.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang pasti diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk Mengetahui ada tidaknya Multikolinearitas dapat pula dilihat pada nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor),* yaitu:

Jika nilai *tolerance* >0,10 dan VIF <10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat Multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Jika nilai *tolerance* <0,10 dan VIF >10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Adapun hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Bet			Tolerance	VI
1	(Constant)	6,098	,71		8,488	,00		
	Disparitas pendapatan	3,699	2,024	,33	1,828	,08	,98	1,0
	Inflasi	-,249	,07	-,659	-3,140	,00	,76	1,3
	Goverment purchase	,04	,02	,45	2,138	,04	,75	1,3

a. Dependent Variable: Pertumbuhan

Sumber: SPSS 19

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui model regresi bebas multikolinieritas karena nilai tolerance semua variabel > 0,10, nilai tolerance variabel disparitas pendapatan sebesar 0,989,variabel inflasi sebesar 0,762 dan variabel goverment purchase sebesar 0,758. VIF variabel independen < 10, yaitu variabel disparitas pendapatan sebesar 1,002,variabel inflasi sebesar 1,3. dan variabel goverment purchase sebesar 1,3. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieriatas dalam regresinya.

4.2.1.3 Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan penghitungan nilai Durbin Watson.

Berikut ini disajikan tabel perhitungan Durbin-Watson dalam model summary

Tabel 4.5

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,680[a]	,463	,362	1,08409	2,158

a. Predictors: (Constant), Goverment purchase, Disparitas pendapatan, Inflasi

b. Dependent Variable: Pertumbuhan

Sumber: SPSS 15

PERPUSTAKAAN UNNES

Dari tabel diatas dapat diketahui perhitungan nilai DW sebesar 2,158. Maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif dalam model regresi. Karena dalam pengujian Durbin-Watson,nilainya terletak1,65<DW<2,35,yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi.Terjadi heteroskedastisitas berarti data mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Berikut ini disajikan grafik scatterplots untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas.

Grafik 4.3

Scatterplot

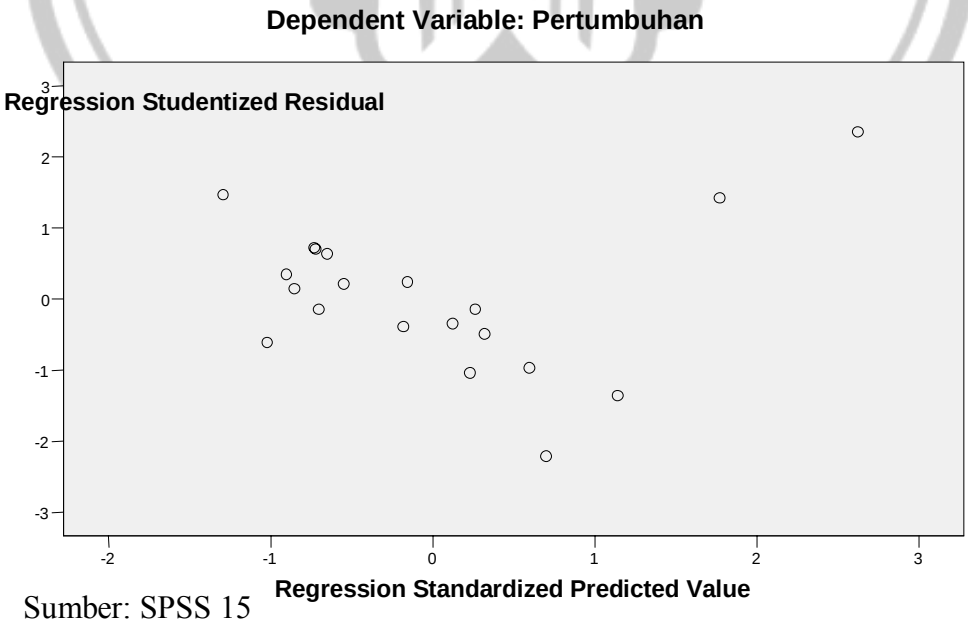

Sumber: SPSS 15

Dari grafik scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan masukan variabel bebas ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan goverment purchase.

4.2.1.5 Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel ketimpangan pendapatan, inflasi dan goverment purchase terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007 secara bersama-sama dapat diketahui dari nilai koefisien R^2 .Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Berikut disajikan tabel yang berisi R square dalam tabel model summary.

PERPUSTAKAAN
UNNES

Tabel 4.7

Model Summary [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,680 [a]	,463	,362	1,08409	2,158

a. Predictors: (Constant), Goverment purchase, Disparitas pendapatan, Inflasi

b. Dependent Variable: Pertumbuhan

Sumber: SPSS 15

Dari tampilan output SPSS besarnya R^2 adalah 0,463, hal ini berarti 46,3% variasi pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh variabel independent Ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan goverment purchase. Sedangkan sisanya (100%-46,3% =53,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. *Standar Error Of Estimate* (SEE) sebesar 1,08409.

4.2.2 Pengujian Hipotesis

4.2.2.1 Uji signifikansi Bersama-sama (Uji Statistik F)

Uji hipotesis secara bersama-sama (Uji F) antara variabel bebas dalam hal ini antara ketimpangan distribusi pendapatan (X_1), inflasi (X_2), goverment purchase (X_3), dan pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil analisis secara bersama-sama berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program SPSS versi 15 diperoleh hasil.

Tabel 4.8

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,216	3	5,405	4,599	,017[a]
	Residual	18,804	16	1,175		
	Total	35,020	19			

a. Predictors: (Constant), Goverment purchase, Disparitas pendapatan, Inflasi

b. Dependent Variable: Pertumbuhan

Sumber: SPSS 15

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for Windows ddengan nilai probabilitas 0,017 dengan signifikansi 5%. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan

(X_1), inflasi (X_2), goverment purchase (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

4.2.2.2 Uji signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik)

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t.

Tabel 4.9

Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,098	,718		8,488	,000		
	Disparitas pendapatan	3,699	2,024	,337	1,828	,086	,989	1,0
	Inflasi	-,249	,079	-,659	-3,140	,006	,762	1,3
	Goverment purchase	,046	,021	,450	2,138	,048	,758	1,3

a. Dependent Variable: Pertumbuhan

Sumber: SPSS 15

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 15 dapat diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel ketimpangan distribusi pendapatan (X_1) dengan probabilitas sebesar 0,086. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil uji t untuk variabel inflasi (X_2) diperoleh hasil probabilitas sebesar 0,006. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh negatif antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji t untuk variabel goverment purchase (X_3) diperoleh probabilitas sebesar 0,05.

Nilai probabilitas sama dengan 0,05 dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh positif antara goverment purchase terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persamaan model regresi dalam penelitian ini adalah:

Pertumbuhan ekonomi = 6,098 +3,699 ketimpangan pendapatan - 0,249 inflasi + 0,46 goverment purchase + e

$Y= 6,098 +3,699 X_1 - 0,249 X_2+ 0,46 X_3 +e$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

(1) Konstanta = 6,098

Jika variabel ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi, dan goverment purchase = 0, maka kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 6,098 point.

(2) Koefisien X_1 (ketimpangan disitribusi pendapatan) = 3,699

Jika ketimpangan distribusi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point, sementara inflasi, dan goverment dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikkan kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3,699 point.

(3) Koefisien X_2 (inflasi) = - 0,249

Jika inflasi mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point, sementara ketimpangan distribusi pendapatan dan goverment purchase dianggap tetap maka akan menyebabkan penurunan kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar - 0,249 point.

(4) Koefisien X_3 (goverment purchase) = 0,46

Jika pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point, sementara ketimpangan distribusi pendapatan dan inflasi dianggap tetap maka akan menyebabkan kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,46 point.

4.3 Pembahasan

Hasil penelitian, regresi yang diperoleh yaitu

$Y= 6,098 +3,699 X_1 - 0,249 X_2+ 0,46 X_3 +e$

Adanya pengaruh positif dari variabel ketimpangan distribusi pendapatan (X_1), dan goverment purchase (X_3) ditunjukkan dari harga-harga koefisien regresi maupun koefisien korelasi yang bertanda positif. Sedangkan inflasi (X_2) mempunyai pengaruh negatif ditunjukkan dari harga koefisien regresi yang bertanda negatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan goverment purchase bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007. Sedangkan secara parsial ketimpangan distribusi pendapatan dan goverment purchase yang tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007. Hal ini dibuktikan dari uji t yang memperoleh signifikansi 0,05%.

Beberapa hal yang dapat dibahas untuk diketahui lebih lanjut dalam penelitian ini:

(1) Pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota yang ada didalamnya. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2003-2007 adalah 4,97%. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 sebesar 4,7 % sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonominya di tahun 2007 menjadi sebesar 6,05%. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mencerminkan kondisi mesin perekonomian berhasil menggerakkan faktor-faktor produksi dengan baik. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang lesu, membutuhkan perhatian ekstra untuk melakukan evaluasi perbaikan mengenai bagian faktor produksi mana yang kurang bekerja secara optimal. Pertumbuhan ekonomi penting diperhatikan karena sering digunakan sebagai bahan pertimbangan awal mengenai rencana atau kebijakan menyangkut kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Informasi ini sangat penting dibutuhkan oleh pihak pembuat kebijakan terkait seperti pemerintah dan stakeholder yang lain.

(2) Ketimpangan distribusi pendapatan atau ketimpangan pendapatan merupakan sebuah kondisi yang terjadi akibat pembangunan yang

dilaksanakan di suatu wilayah. Kondisi yang terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah cukup tinggi, namun penduduk di daerah tersebut belum bisa dikatakan sejahtera. Karena ternyata hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat saja. Sehingga tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai yakni, menyejahterakan kehidupan rakyat belum berhasil direalisasikan. Dengan penghitungan indeks ketimpangan Williamson dapat diketahui ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa dari tahun 2003-2007 berkisar 0,007-0,390. Dengan besarnya rata-rata ketimpangan pendapatan selama tahun 2003-2007 yakni 0,13. Sehingga tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkatan rendah. Angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta rendah mengingat pertumbuhan ekonominya juga masih rendah. Sedangkan hubungan antara disparitas pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi bertanda positif sesuai dengan hipotesa *Kuznets* bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan, semakin baik distribusi pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

(3) Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mempunyai dampak yang luas terhadap makro ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi menunjukkan stabilitas harga yang merupakan ukuran keberhasilan ekonomi makro suatu negara. Inflasi yang tinggi biasanya ditengarai memiliki *efek negatif* bagi perekonomian sebab inflasi yang tinggi akan

mengganggu mobilisasi dana domestik dan tingkat investasi (Wibisono,2005:98). Dalam penelitian ini koefisien dari variabel bebas inflasi hasil regresi mempunyai tanda *negatif signifikan* sehingga sesuai dengan hipotesa awal. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk jika terjadi inflasi yang tinggi yang tidak dikendalikan, sebab akan mengurangi investasi produktif, mengurangi eksport dan menaikkan impor barang sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Rata-rata laju inflasi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2003-2007 adalah 8,25%. Rata-rata laju inflasi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 sebesar 13,35% sedangkan di tahun 2006 rata-rata pertumbuhannya hanya 4,7%. Sedangkan pada tahun 2006 dengan laju inflasi sebesar 4,9% pertumbuhannya mampu tumbuh 6,05% Laju inflasi di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong rendah dan harus tetap diperhatikan agar tidak terjadi hiperinflasi yang akan menghambat pembangunan.

(4) Pengeluaran pemerintah relatif penting berperan dalam sektor perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien tidak akan memperbaiki produktivitas perekonomian daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang tidak produktif, maka semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan berkurang. Konsumsi pemerintah daerah dalam penelitian ini terlihat memiliki efek *positif dengan tingkat signifikan* terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu

sebesar 95 %. Anaman (2004:89) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil proporsinya akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang terlalu boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif oleh pengeluaran pemerintah dihasilkan oleh daerah-daerah yang memiliki proporsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP-nya di atas 12 persen, sedang dampak positif dihasilkan oleh daerah-daerah yang memiliki proporsi pengeluaran pemerintah terhadap GDP-nya di bawah 12 persen. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan Kota Yogyakarta yang tinggi yaitu sebesar 9% pada tahun 2007 dengan proporsi pengeluaran pemerintahnya 10% dari PDRB. Sedangkan Kabupaten Kolonprogo yang proporsi pengeluaran pemerintahnya mencapai 26% dari PDRB hanya tumbuh 4%. Sehingga dalam kedepannya diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dalam membuat anggaran belanja efektif dan efisien sehingga dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB V

PENUTUP

5.1Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2007 yang dihitung dengan indeks ketimpangan Williamson sebesar 0,13. Ini berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkatan yang rendah. Namun bila kita lihat satu persatu hanya Kota Yogyakarta mempunyai tingkat ketimpangan yang sedang yaitu pada kisaran 0,36.
2. Indeks ketimpangan Williamson tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan, hal ini bisa dilihat dari probabilitas signifikansi untuk ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,086,untuk tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif sebesar -0,249 dengan tingkat signifikansi 0,06 sedangkan pengeluaran pemerintah kabupaten/ kota tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,5.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas muka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah kabupaten/ kota diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional tanpa harus memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan selalu mengadakan pengkajian terhadap besaran kesenjangan yang terjadi di daerahnya untuk pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif.
2. Menambah kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru di luar Kota Jogja dan Sleman agar pemerataan aktivitas ekonomi sehinngga pada gilirannya pemerataan pendapatan dapat meningkat di masa depan.
3. Pemerintah kabupaten/ kota diharapkan mampu mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah yang proporsional sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi .

PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan. edisi ketiga*. Yogyakarta. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.

Castelló-Climent ,Amparo. A Reassessment of The Relationship Between Inequality and Growth: What Human Capital Inequality Data Say.*Universidad Carlos III de Madrid*,March 2005

Boediono, 1982. Ekonomi Makro. BPFE-UGM, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2003. DIY Dalam Angka. Yogyakarta

_____ . 2004. DIY Dalam Angka. Yogyakarta

_____ . 2005. DIY Dalam Angka. Yogyakarta

_____ . 2006. DIY Dalam Angka. Yogyakarta

_____ . 2007. DIY Dalam Angka. Yogyakarta

Dornbusch R, Stanley Fischer dan Richard Startz, 2000. Makroekonomi, edisi keempat. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.

Etharina.Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia.*Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Agustus 2005, I (1), HAL. 59-74.

Farid,Miftah.2007.Pengaruh Disparitas Antar Daerah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Menggunakan Data Panel Propinsi.Depok.Universitas Indonesia.

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Mankiw. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Ortega-Díaz ,Araceli. Assessment of The Relationship Between Income Inequality And Economic Growth **:**A Panel data analysis across the 32 Federal Entities of México1960-2002,August 2003

Puspita, Klarawidya.2006.Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi di Indonesia 1993-2002. Depok, Universitas Indonesia.

Setyowati, E. Sanusi, Bachrawi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Rianasari Damayanti, Subagyo, Rudi Badrudin, Suryati K, Algifari, Haryono Subiyakto, Sri Fatmasari, Astuti Purnamawati. 2000. *Ekonomi Makro*: Pengantar. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.

Sukirno, S. 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi kedua. PT. Rajawali Grasindo Persada. Jakarta.

Sulaiman,Wahid.2000.*Jalan Pintas Mengusai Spss 10*.Yogyakarta:Andi Offset

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematika dan pendekatan*. Jakarta. Salemba Empat.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Kian Wie, Thee.2004.*Pembangunan,Dan Mukjizat Orde Baru.Jakarta* :Kompas

Todaro, Michael. 1995. *Ekonomi untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar tentang Prinsip-prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. edisi ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.

Tumbunan, Tulus. 2001, Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wibisono, Yusuf.*Su*mber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Januari 2005, Vol.02, hal.91-120.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*.Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

PERPUSTAKAAN
UNNES

Indeks Williamson di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2003

Kabupaten/Kota	(yi)	Y	fi	n	yi-y	(yi-y)2	fi/n	(yi-y)2 fi/n	√(yi-Y)2 fi/n)	√(yi-Y)2 fi/n)/Y
01 Kota Yogyakarta	10175588	4816015	392492	3189444	5359573,000	2,8725E+13	0,123	3534892484766	1880130,975	0,3904
02 Kab. Sleman	4878095	4816015	942231	3189444	62080,000	3853926400	0,295	1138533527	33742,162	0,0070
03 Kab.Bantul	3627281	4816015	808423	3189444	1188734,000	1,41309E+12	0,253	358173168374	598475,704	0,1243
04 Kab. Gunung kidul	3736926	4816015	676095	3189444	1079089,000	1,16443E+12	0,212	246835303084	496825,224	0,1032
05 Kab. Kulonprogo	3616154	4816015	370202	3189444	1199861,000	1,43967E+12	0,116	167103541484	408783,000	0,0849

Indeks Williamson di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2004

Kabupaten/Kota	(yi)	Y	fi	n	yi-y	(yi-y)2	fi/n	(yi-y)2 fi/n	√(yi-Y)2 fi/n)	√(yi-Y)2 fi/n)/Y
01 Kota Yogyakarta	9815114	4895788	427442	3298033	4919326,000	2,41998E+13	0,130	3136414147233	1770992,419	0,3617
02 Kab. Sleman	4977241	4895788	971899	3298033	81453,000	6634591209	0,295	1955151013	44217,090	0,0090
03 Kab.Bantul	3640936	4895788	846022	3298033	1254852,000	1,57465E+12	0,257	403935175551	635558,947	0,1298
04 Kab. Gunung kidul	3846283	4895788	679419	3298033	1049505,000	1,10146E+12	0,206	226908996339	476349,658	0,0973
05 Kab. Kulonprogo	3747449	4895788	373252	3298033	1148339,000	1,31868E+12	0,113	149240733843	386316,883	0,0789

Indeks Williamson di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2005

Kabupaten/Kota	(yi)	Y	fi	n	yi-y	(yi-y)2	fi/n	(yi-y)2 fi/n	√(yi-Y)2 fi/n)	√(yi-Y)2 fi/n)/Y
01 Kota Yogyakarta	10109338	5057661	435236	3343651	5051677,000	2,55194E+13	0,130	3321811759309	1822583,814	0,3604
02 Kab. Sleman	5131220	5057661	990130	3343651	73559,000	5410926481	0,296	1602296602	40028,697	0,0079
03 Kab.Bantul	3747763	5057661	862961	3343651	1309898,000	1,71583E+12	0,258	442838311588	665460,977	0,1316
04 Kab. Gunung kidul	4000254	5057661	681554	3343651	1057407,000	1,11811E+12	0,204	227910163334	477399,375	0,0944
05 Kab. Kulonprogo	3920770	5057661	373770	3343651	1136891,000	1,29252E+12	0,112	144484465842	380111,123	0,0752

Indeks Williamson di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2006

Kabupaten/Kota	(yi)	Y	fi	n	yi-y	(yi-y)2	fi/n	(yi-y)2 fi/n	√(yi-Y)2 fi/n)	√(yi-Y)2 fi/n)/Y
01 Kota Yogyakarta	10322562	5157411	443112	3388733	5165151,000	2,66788E+13	0,131	3488527928785	1867760,137	0,3622
02 Kab. Sleman	5265383	5157411	1E+06	3388733	107972,000	11657952784	0,298	3468746432	58896,065	0,0114
03 Kab.Bantul	3750344	5157411	879825	3388733	1407067,000	1,97984E+12	0,260	514030041854	716958,884	0,1390
04 Kab. Gunung kidul	4141979	5157411	683389	3388733	1015432,000	1,0311E+12	0,202	207937262947	456001,385	0,0884
05 Kab. Kulonprogo	4075913	5157411	374112	3388733	1081498,000	1,16964E+12	0,110	129126603667	359341,904	0,0697

Indeks Williamson di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2007

Kabupaten/Kota	(yi)	Y	fi	n	yi-y	(yi-y)2	fi/n	(yi-y)2 fi/n	√(yi-Y)2 fi/n)	√(yi-Y)2 fi/n)/Y
01 Kota Yogyakarta	10587919	5325762	451118	3434534	5262157,000	2,76903E+13	0,131	3637055589768	1907106,602	0,3581
02 Kab. Sleman	5408815	5325762	1E+06	3434534	83053,000	6897800809	0,299	2062123783	45410,613	0,0085
03 Kab.Bantul	3845008	5325762	896994	3434534	1480754,000	2,19263E+12	0,261	572647734640	756734,917	0,1421
04 Kab. Gunung kidul	4292535	5325762	685210	3434534	1033227,000	1,06756E+12	0,200	212984189458	461502,101	0,0867
05 Kab. Kulonprogo	4239955	5325762	374445	3434534	1085807,000	1,17898E+12	0,109	128536209955	358519,469	0,0673

LAMPIRAN

Tabel PDRB Riil Tahun 2003-2007

Kabupaten /Kota	PDRB Riil				
	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Yogyakarta	5266754	5875890	6770089	7732639	8599468
Kab. Sleman	5908413	6604997	7669099	8898670	9972193
Kab.Bantul	3745732	4238736	4898268	5722466	6409648
Kab. Gunung kidul	3088660	3389809	3853621	4412844	4872123
Kab. Kulonprogo	1639205	1832453	2074363	2414960	2672861

Tabel PDRB Nominal Tahun 2003-2007

Kabupaten /Kota	PDRB Nominal				
	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Yogyakarta	4596293	4837376	5080563	5080563	5553593
Kab. Sleman	3993837	4195392	4399902	4574051	4776401
Kab.Bantul	2932376	3080312	3234173	3299646	3448949
Kab. Gunung kidul	2526516	2613238	2726389	2726389	2941288
Kab. Kulonprogo	1338700	1398743	1465477	1524848	1587630

Tabel PDRB Deflator Tahun 2003-2007

Kabupaten /Kota	Deflator PDRB				
	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Yogyakarta	114,5869943	121,46854	133,2547003	152,2004353	154,8451246
Kab. Sleman	147,9382609	157,4345615	174,3015867	194,5468033	208,7804814
Kab.Bantul	127,7370978	137,6073593	151,4534937	173,4266646	185,8435135
Kab. Gunung kidul	122,24977	129,7168111	141,3452372	161,856727	165,6459007
Kab. Kulonprogo	122,4475237	131,0071257	141,5486562	158,3738182	168,3554103

Tabel Laju Inflasi Tahun 2003-2007

Kabupaten /Kota	Laju Inflasi				
	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Yogyakarta	-	6,01	9,70	14,22	1,74
Kab. Sleman	-	6,42	10,71	11,62	7,32
Kab.Bantul	-	7,73	10,06	14,51	7,16
Kab. Gunung kidul	-	6,11	8,96	14,51	2,34
Kab. Kulonprogo	-	6,99	8,05	11,89	6,30

Tabel Konsumsi Pengeluaran Daerah Tahun 2003-2007

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Kota Yogyakarta	406.856.436	415.207.191	400.866.719	571.236.503	626.227.188
2	Kab. Sleman	429.845.582	507.615.573	543.911.827	704.214.358	789.513.421
3	Kab.Bantul	421.692.042	403.864.126	425.279.388	606.237.512	715.598.142
4	Kab. Gunung kidul	320.485.994	377.887.348	362.385.670	518.924.012	626.807.566
5	Kab. Kulonprogo	338.086.546	415.207.191	300.780.321	475.512.795	523.362.177

Tabel Laju Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Tahun 2003-2007

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Kota Yogyakarta	-	2,05	-3,45	42,50	9,63
Kab. Sleman	-	18,09	7,15	29,47	12,11
Kab.Bantul	-	-4,23	5,30	42,55	18,04
Kab. Gunung kidul	-	17,91	-4,10	43,20	20,79
Kab. Kulonprogo	-	-6,67	-4,68	58,09	10,06

Tabel Laju Pertumbuhan Tahun 2003-2007

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Kota Yogyakarta	-	4,76	5,05	4,87	9,31
2	Kab. Sleman	-	5,08	5,25	5,03	4,42
3	Kab.Bantul	-	4,69	5,04	4,99	4,52
4	Kab. Gunung kidul	-	3,36	3,43	4,33	7,88
5	Kab. Kulonprogo	-	4,19	4,49	4,77	4,12

Regression

Data View

s

Y	X_1	X_2	X_3
4,76	0,36	6,01	2
5,08	0,01	6,42	15
4,69	0,13	7,73	-4
3,36	0,1	6,11	15
4,19	0,08	6,99	-7
5,05	0,36	9,7	-4
5,25	0,01	10,71	7
5,04	0,13	10,06	5
3,43	0,09	8,96	-4
4,49	0,08	8,05	-5
4,87	0,36	14,22	30
5,03	0,01	11,62	23
4,99	0,14	14,51	30
4,33	0,09	14,51	30
4,77	0,07	11,89	37
9,31	0,36	1,74	9
4,42	0,01	7,32	11
4,52	0,14	7,16	15
7,88	0,09	2,34	17
4,12	0,07	6,3	9

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X1, X2[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,680[a]	,463	,362	1,08409	2,158

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,216	3	5,405	4,599	,017[a]
	Residual	18,804	16	1,175		
	Total	35,020	19			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant	6,098	,718		8,488	,000		
	X1	3,699	2,024	,337	1,828	,086	,989	1,011
	X2	-,249	,079	-,659	-3,140	,006	,762	1,313
	X3	,046	,021	,450	2,138	,048	,758	1,319

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3,121	1,000	,01	,03	,01	,03
	2	,569	2,342	,00	,38	,00	,36
	3	,249	3,538	,10	,52	,08	,49
	4	,060	7,190	,88	,07	,91	,12

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,7837	7,4021	4,9790	,92383	20
Std. Predicted Value	-1,294	2,623	,000	1,000	20
Standard Error of Predicted Value	,294	,720	,470	,124	20
Adjusted Predicted Value	3,5222	6,4599	4,9042	,81429	20
Residual	-2,26522	1,90786	,00000	,99483	20
Std. Residual	-2,090	1,760	,000	,918	20
Stud. Residual	-2,209	2,354	,029	1,052	20
Deleted Residual	-2,53100	3,41229	,07484	1,33230	20
Stud. Deleted Residual	-2,565	2,818	,038	1,158	20
Mahal. Distance	,443	7,427	2,850	2,045	20
Cook's Distance	,001	1,092	,097	,243	20
Centered Leverage Value	,023	,391	,150	,108	20

a. Dependent Variable: Y

Charts

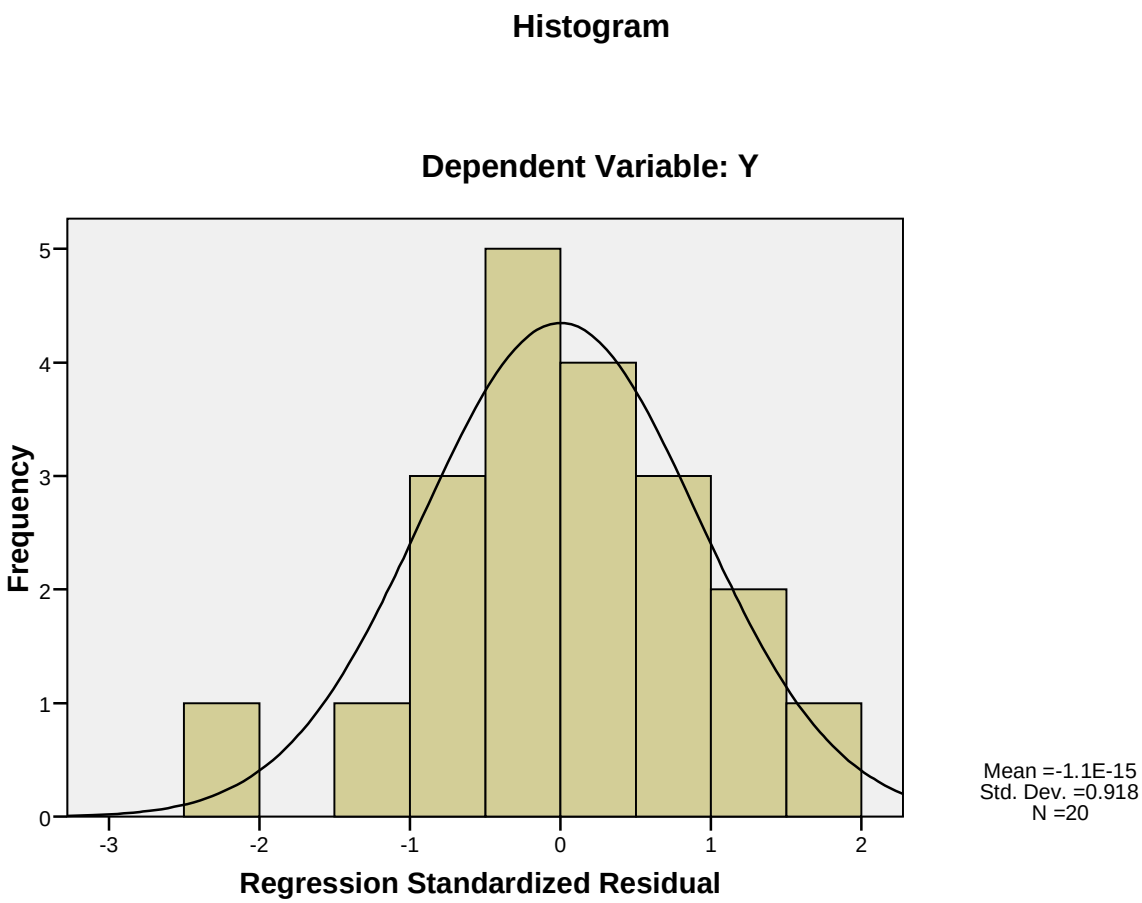
Histogram
Dependent Variable: Y
Frequency
5
4
3
2
1
0
-3
-2
-1
0
1
2
Regression Standardized Residual
Mean =-1.1E-15
Std. Dev. =0.918
N =20

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

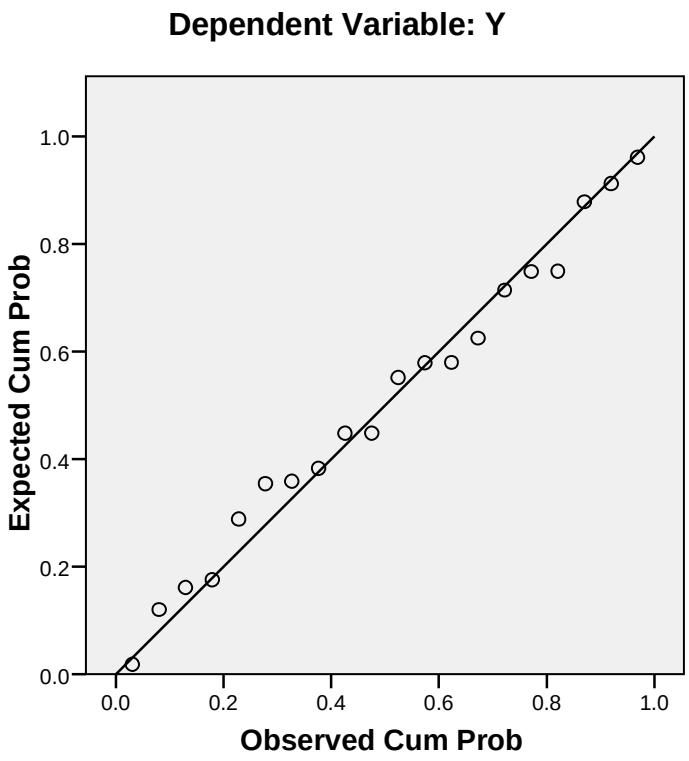

Scatterplot

Dependent Variable: Y

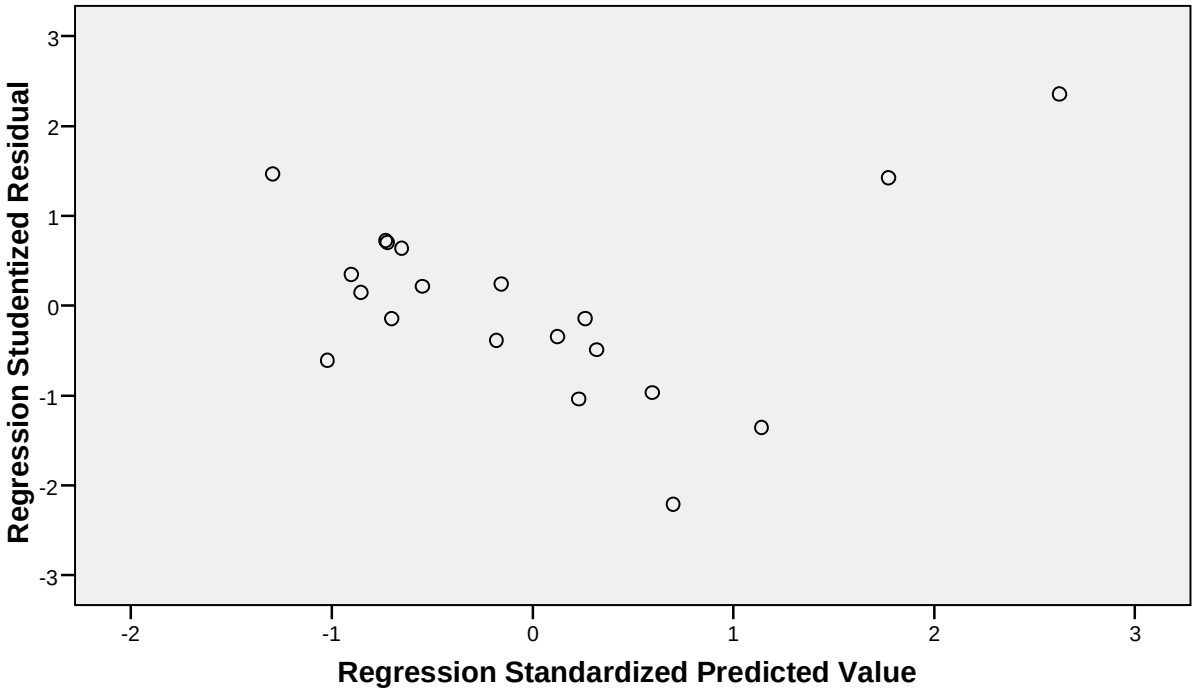

Filename: 6059
Directory: D:\AJIEK Digilib
Template: C:\Users\Pak DEDE\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: benz
Keywords:
Comments:
Creation Date: 20/03/2011 17:07:00
Change Number: 3
Last Saved On: 20/03/2011 17:16:00
Last Saved By: pakdede
Total Editing Time: 15 Minutes
Last Printed On: 21/03/2011 7:32:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 100
Number of Words: 16.080 (approx.)
Number of Characters: 91.661 (approx.)